



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-67.KP.03.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Sek.2.KP.06.02-274 tanggal 08 Desember 2020 hal Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama a.n. Savira Juniastira, S.Psi., dkk., Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**



**MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP. 196101291985031001**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
5. Pembuat Daftar Gaji Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

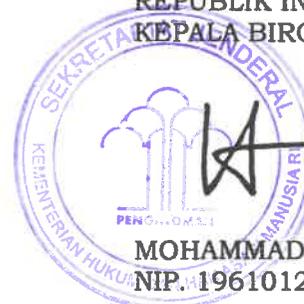
NOMOR : SEK.2-67.KP.03.04 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 Desember 2020

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT (GOL/RUANG) | JABATAN BARU | ANGKA KREDIT |
|----|---|------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SAVIRA JUNIASTIRA, S.Psi. NIP. 199506112019012001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 2. | DIAH ARHAMIKA, S.Psi. NIP. 199605052019012001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 3. | GHILMAN HIZBUL ISLAM ZEN. S.H. NIP. 199112072019011001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 4. | YULIANTO HADI PRAMONO, S.Psi. NIP. 199107142019011001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 5. | NIA SEPTIANINGRUM, S.Psi. NIP. 199409042019012001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 6. | ILHAM AWALUDDIN, S.Psi. NIP. 199408232019011001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 7. | MAYBELLE BUDHININGTYAS, S.Psi. NIP. 198705102019012001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |
| 8. | DIAN DIN ASTUTI MULIA, S.Psi. NIP. 199003162019012001 | Penata Muda (III/a) | Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | 102,000 |



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP.196101291985031001